

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NO. 21 TAHUN
2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik*



Oleh

**AINUL RAHMI
2010/18510**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar
No. 21 Tahun 2012 Tentang Standar
Operasional Pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Tanah Datar

Nama : Ainul Rahmi

TM/NIM : 2010/18510

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

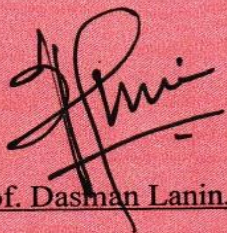
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Juli 2014

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Prof. Dasman Lanin, M.Pd.Ph.D

19570416 198602 1 001

Pembimbing II



Adil Mubarak, S.IP, M.Si

19790108 200912 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

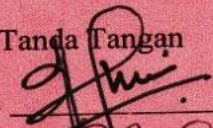
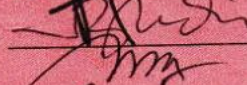
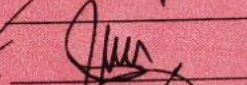
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Rabu 23 Juli 2014 Pukul 11.30 s/d 12.30 WIB

**Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar No. 21 Tahun 2012 Tentang
Standar Operasional Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar**

Nama : Ainul Rahmi
TM/NIM : 2010/18510
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

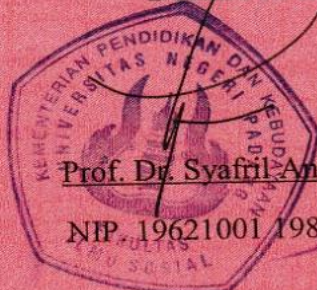
Padang, 23 Juli 2014

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Prof. Dasman Lanin, M.Pd.Ph.D	1. 
Sekretaris	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si	2. 
Anggota	: Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D	3. 
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	4. 
Anggota	: Zikri Alhadi, S.IP. MA	5. 

Mengesahkan :

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd

NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ainul Rahmi
NIM/Tahun Masuk : 18510/2010
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar No. 21 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 23 Juli 2014

Saya menyatakan


AINUL RAHMI

8510/2010

ABSTRAK

AINUL RAHMI : Nim 2010/18510. Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar No 21 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan pada KPPT Kabupaten Tanah Datar dan masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tetapi tidak memiliki izin mendirikan bangunan sehingga KPPT Kabupaten Tanah Datar mendapatkan kendala-kendala dalam implementasi peraturan bupati tentang SOP IMB pada KPPT Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Implementasi Peraturan Bupati tentang SOP Izin Mendirikan Bangunan pada KPPT Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari segi ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosil, politik 2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan bupati tentang SOP izin mendirikan bangunan pada KPPT Kabupaten Tanah Datar. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi izin mendirikan bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar belum mencapai tujuan dengan optimal, dari enam indikator implementasi kebijakan publik yang terlaksana dengan baik hanya tiga indikator yaitu karakter, sikap, komunikasi agen pelaksana dan tiga lainnya belum terlaksana dengan baik yaitu 1) Tujuan kebijakan, belum maksimalnya pencapaian tujuan kebijakan. 2) Sumberdaya yang belum mendukung dalam implementasi Izin mendirikan Bangunan, 3) Lingkungan ekonomi, sosial, politik yang tidak stabil. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan KPPT melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ada dalam implementasi SOP izin mendirikan bangunan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatu

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar No 21 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar”**. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Kepada keluarga, sahabat, serta tak lupa juga kita yang senantiasa selalu istiqamah dan ikhlas untuk menjadi umatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP.
3. Ketua jurusan Ilmu Sosial Politik Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D dan Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.

4. Bapak Drs.Syamsir,M.Si,Ph.D yang telah banyak membantu memperlancar penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd.Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D , Drs. Karjuni Dt. Maani, M.si, dan Bapak Zikri Alhadi S.IP. MA selaku tim penguji yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen progran studi Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
8. Bapak Drs. Faisal. A selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar.
9. Bapak Nusirwan, SH. S.Sos. MT selaku Kasubag Tata Usaha Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar.
10. Bapak Syukril V.Syaukani selaku Kepala Seksi Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar.
11. Teristimewa untuk orang tuaku, Adik-ku tersayang serta keluarga yang telah memberikan Do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi. Dengan do'a, semangat serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

12. Rekan-rekanku program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2010 terima kasih atas segala kebaikannya.
13. Seluruh sahabat dan teman teman-temanku yang telah membangkitkan semangat studiku, serta telah memberi masukan dan bantuan selama ini, baik dalam penulisan skripsi maupun dalam menjalani studiku selama ini.
14. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan penuh harapan dan do'a semoga penelitian sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Amin ya rabbal allamin.

Padang, 23 Juli 2014

Ainul Rahmi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Batasan dan Fokus Penelitian	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	8
1. Konsep Implementasi	8
A. Pengertian Implementasi	8
B. Model Implementasi Kebijakan	10
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan	15

D. Syarat dan Sumber-sumber Implementasi Kebijakan	18
E. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan	20
2. Teori Pelayanananan	21
A. Pengertian Pelayanananan	21
B. Pengertian Pelayanananan Publik.....	22
C. Unsur Pelayanananan Publik	24
D. Azaz, Prinsip, dan Standar Pelayanananan Publik	25
E. Penyelenggaraan Pelayanananan Publik	29
3. Izin Mendirikan Bangunan	35
A. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan	35
B. Manfaat Izin Mendirikan Bangunan	38
C. Penelitian Yang Relevan	39
B. Kerangka Konseptual	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Informan Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Uji Keabsahan Data	47
G. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	51
B. Temuan Khusus	63
C. Pembahasan	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	109
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Yang Relevan 41
Tabel 4. 1	Petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 57
Tabel 4.2	Rekapitulasi Izin Mendirikan Bangunan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2013 66
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 68
Tabel 4.4	Aset Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	43
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara 110
Lampiran 2	Surat Izin Melakukan Penelitian 113
Lampiran 3	Surat Pengantar Penelitian 114
Lampiran 4	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar 115
Lampiran 5	Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar 117
Lampiran 6	Lampiran Foto-foto 119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan harus disesuaikan dengan keadaan wilayah dimana pembangunan itu dilaksanakan. Disamping itu sumber daya manusia di Indonesia sangatlah besar dan sangat mendukung keberhasilan pembangunan. Besarnya sumber daya manusia dan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan beserta komitmen untuk melaksanakannya sehingga pembangunan dapat diwujudkan dengan maksimal. Pentingnya pembangunan mutlak harus sejalan dengan penataan ruang.

Kasiyanto, M J (1991:25) mengemukakan “Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang harus mengacu pada beberapa aspek seperti, keamanan, kenyamanan, produktifitas serta dapat bermanfaat secara luas bagi semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan konsep penggunaan ruang ini bukan hanya untuk hari ini dan tahun depan saja tapi untuk generasi dimasa depan.

Untuk menciptakan pembangunan yang mengacu kepada konsep tata ruang dan mewujudkan wilayah yang nyaman dan kondusif pemerintah membuat kebijakan yang mewajibkan seluruh masyarakat yang mendirikan bangunan untuk mengurus surat IMB di Kantor Pelayanan yang ada di setiap Kabupaten/kota di seluruh

Indonesia. Tujuan masyarakat diwajibkan untuk mengurus surat IMB itu sendiri adalah untuk menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Dengan adanya IMB maka akan tercipta keserasian, keseimbangan antara lingkungan dan bangunan dikutip dari <http://prestylarasati.files.wordpress.com?....>, di akses pada tanggal 30 Maret 2014.

Di Kabupaten Tanah Datar kewajiban untuk mengurus surat IMB juga diterapkan oleh pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat yang akan mendirikan bangunan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat masyarakat agar mengurus surat IMB, tetapi upaya pemerintah tersebut belum berjalan dengan baik, faktanya dalam Rekapitulasi Izin yang Dikeluarkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Tanah Datar Januari/Desember 2013 tercatat 179 orang saja yang mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan, hal tersebut tidak sebanding dengan pembangunan pada tahun 2013.

Dari data yang diperoleh dari KPPT Kabupaten Tanah Datar dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah masih buruk dan jauh dari harapan, selain itu dapat dibuktikan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengurus surat IMB meskipun pemerintah telah melakukan banyak cara untuk menarik minat masyarakat seperti membuat melakukan sosialisasi, tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Yang menjadi masalah utama pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini adalah apa yang menyebabkan masyarakat tidak mengurus surat IMB.

Rendahnya minat masyarakat untuk mengurus Surat IMB memang menjadi salah satu penghambat yang sangat serius bagi pemerintah untuk menjalankan peraturan tentang Standar Operasional Pelayanan di KPPT di Kabupaten Tanah Datar, dalam Standar Operasional Pelayanan pemerintah mengatur tentang persyaratan dan prosedur mengurus Surat IMB yang mewajibkan kepada seluruh masyarakat yang akan mendirikan bangunan.

Dalam menetapkan peraturan pemerintah mendapatkan berbagai macam hambatan dan rintangan seperti kurangnya atau rendahnya minat masyarakat. Pada dasarnya minat masyarakat tidak dapat dipaksakan karena pada umumnya masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui apa tujuan dan manfaat dari Surat IMB. Padahal pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Standar Operasional Pelayanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan IMB dan menjadi acuan dan pedoman sebelum mendirikan bangunan.

Permasalahan lain yang menjadi tantangan pemerintah adalah banyak masyarakat yang mengeluh bahwa mereka tidak mengerti apa itu Standar Operasional Pelayanan. Sedangkan dalam Standar Operasional Pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah sudah dilampirkan persyaratan dan prosedur pengurusan IMB dan semua persyaratan yang harus diikuti oleh masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan tata ruang kota yang indah dan bangunan yang tertata rapi.

Selain itu sebagian masyarakat juga mengatakan dengan adanya Standar Operasional Pelayanan ini hanya mempersulit mereka untuk mengurus Surat IMB karena prosedur yang dilalui terlalu banyak dan untuk mengurusnya membutuhkan

waktu yang lama. Sebenarnya dari sekian banyak keluhan yang di sampaikan masyarakat itu pada dasarnya hanya kurang pemahaman tentang manfaat dan tujuan dari Standar Operasional Pelayanan tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Syukril Vidya Syaukani,SE,MM sebagai Kepala Seksi Perizinan Pada KPPT Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 28 Maret 2013 Jam 09.30 mengatakan bahwa:

“Kesadaran masyarakat di Kabupaten Tanah Datar untuk mengurus surat IMB masih tergolong rendah padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pentingnya surat IMB tersebut. Alasan masyarakat untuk tidak mengurus IMB bermacam-macam, ada yang mengatakan IMB tidak berguna karena bangunan mereka jauh dari pusat kota, masyarakat tidak mengerti tentang Standar Operasional Pelayanan, masyarakat tidak paham apa guna dan manfaat Surat Izin Mendirikan Bangunan, ada juga masyarakat yang mengatakan prosedur dan persyaratan pengurusan yang dipersulit. Padahal dari pihak KPPT sudah memberikan pelayanan maksimal dan melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus surat IMB. Manfaat memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan akan dinikmati sendiri oleh masyarakat, misalnya apabila ada pelebaran jalan raya yang dilakukan oleh dinas PU tidak akan mengenai rumah karena dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan sudah di tetapkan jarak bangunan dari as jalan raya”.

Sedangkan dari hasil observasi awal yang peneliti amati memang benar bahwa kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengurus surat IMB buktinya masih banyak rumah-rumah masyarakat yang tidak ada memiliki IMB. Berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan observasi lapangan sangat perlu diadakan penelitian tentang kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar No.21 tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan IMB pada KPPT Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul tentang **“Implementasi Peraturan Bupati No.21 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih kurangnya minat masyarakat untuk mengurus IMB.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegunaan dan manfaat IMB.
3. Standar operasional Pelayanan pengurusan yang kurang dipahami oleh masyarakat.
4. Persyaratan dalam dalam pengurusan yang terlalu banyak yang menyulitkan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah sangat penting agar bisa diketahui arah jalannya suatu penelitian. Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No.21 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan IMB pada KPPT Kabupaten Tanah Datar?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Pemberian IMB di Kabupaten Tanah Datar?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Pemberian IMB di Kabupaten Tanah Datar?

D. Batasan dan Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terfokus dan tidak mengambang karena mengingat keterbatasan kemampuan dari penulis serta untuk mempertajam pembahasan maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar No.21 tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan IMB Pada KPPT Kabupaten Tanah Datar, kendala yang dihadapi pemerintah dalam Implementasi Standar Operasional Pelayanan IMB pada KPPT Kab. Tanah Datar, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Bupati No.21 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan IMB pada KPPT Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk Menganalisa Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Pemberian IMB di Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Pemberian IMB di Kabupaten Tanah Datar.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran, pengkajian, teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Pelayanan IMB pada KPPT Kab. Tanah Datar dan Sistem Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Tanah Datar dalam Pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk karya ilmiah guna membantu memecahkan masalah-masalah mengenai Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Tentang Standar Operasional Pelayanan IMB pada KPPT kabupaten Tanah Datar.